



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN  
SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka guna pedoman penetapan alokasi dan besaran, penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 54);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa non Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa lainnya.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Pengalokasian ADD adalah besaran ADD yang diterima oleh Desa.
13. Penyaluran ADD adalah proses pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah yang disingkat RKUD ke Rekening Kas Desa yang disingkat RKD.
14. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Pekalongan.
20. Rekening Kas Desa yang disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untukmembayar seluruh pengeluaran Desa.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
25. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
26. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Pekalongan.

## BAB II PENGELOLAAN ADD

### Pasal 2

ADD dianggarkan dalam APBD setiap tahun.

### Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
  - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

#### Pasal 4

ADD dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

### BAB III PRINSIP PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 5

ADD dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

#### Pasal 6

ADD digunakan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

#### Pasal 7

Penggunaan ADD tertuang dalam APBDesa yang mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

## Pasal 8

Penetapan Rincian Besaran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non PNS/TNI/POLRI, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan
  - b. diberikan dengan alokasi besaran sebagai berikut:
    1. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
    2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
    3. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- (2) Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD diprioritaskan untuk:
  - a. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari 6,24% (enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah desa dan 3% (tiga perseratus) dari Penghasilan tetap dibayar oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
  - e. operasional Pemerintah Desa;
  - f. tunjangan BPD;
  - g. operasional BPD;
  - h. peningkatan kapasitas BPD;
  - i. honorarium tenaga profesional tertentu;
  - j. operasional kelembagaan desa; dan
  - k. sarana dan prasarana Pemerintah Desa.

- (3) Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tunjangan Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa sebesar Rp1. 673.360,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  - b. tunjangan Kepala Desa PNS setara dengan TPP Kepala Kelurahan;
  - c. tunjangan Sekretaris Desa sebesar Rp700.580,00 (tujuh ratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
  - d. Tunjangan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp112.800,00 (seratus dua belas ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf f diberikan setiap bulan di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima rupiah);
  - c. tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - d. tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan secara non tunai.
- (6) Pemerintah Desa dapat menggunakan ADD di luar prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa apabila semua prioritas tersebut telah terpenuhi.

#### BAB IV PENYALURAN DAN PELAKSANAAN ADD

##### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa yang anggarannya bersumber dari ADD berpedoman pada pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengelolaan ADD dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Guna tertib administrasi pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian ADD dibentuk Pengelola ADD.
- (2) Pengelola ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dalam Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

BAB V  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD setiap bulan kepada Camat selaku Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kecamatan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan.
- (3) Penyampaian rekapitulasi laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan berikutnya.

Pasal 14

Dalam hal kepala Desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), maka penyaluran ADD tahap berikutnya ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap sebelumnya.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati dan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan ADD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- (3) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah/APIP.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN  
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

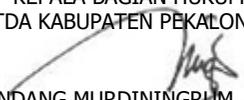
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN  
pada tanggal 18 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
ttd  
BAMBANG IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
ENDANG MURDININGRUM, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,  
PENETAPAN RINCIAN DAN  
PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021.

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

A. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

1. Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Pengarah : 1. Bupati.  
2. Wakil Bupati.  
3. Sekretaris Daerah
- 2) Penganggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
- 3) Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 4) Wakil Ketua : Kepala Bidang Admininstrasi dan Penataan Pemerintahan Desa Dispermades.
- 5) Sekretaris : Kasi Fasilitasi Regulasi dan Pengembangan Desa Dinas PMD, P3A dan PPKB.
- 6) Anggota : Perangkat Daerah terkait, meliputi:
  - a) Inspektorat;
  - b) BAPPEDA LITBANG;
  - c) BPKD;
  - d) Bagian Hukum Setda;
  - e) Dispermades.

b. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Ketua : Camat.
- 2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- 3) Sekretaris : Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- 4) Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.

c. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

- 1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).
  - 2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
  - 3) Kasi/Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) sesuai dengan bidangnya.
  - 4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.
- d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.  
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- 1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa
  - 2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.
  - 3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

## B. MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### 1. Tingkat Desa:

Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq. Kepala Dinas PMD, P3A dan PPKB melalui Camat setempat, dengan dilampiri :

#### **Tahap I**

- a. RPJMDesa dan RKPDesa
- b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);
- c. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- d. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1 (satu) Tahun Anggaran;
- f. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan; dan
- g. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2021.

#### **Tahap II**

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap I yang disusun per kegiatan.

- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- e. Laporan Keuangan Desa.

### **Tahap III**

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
- c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap II yang disusun per kegiatan.
- d. Laporan Realisasi APBDesa Semester pertama.

### **Tahap IV**

- a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;
  - c. laporan realisasi dilengkapi surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahap III.
2. Tingkat Kecamatan:
    - a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa sesuai tahapan, dengan cara:
      - 1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sudah tercantum dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2021;
      - 2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa; dan
    - b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dispermades setelah persyaratan lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa.
  3. Tingkat Kabupaten:
    - a. Dispermades mengajukan permohonan persetujuan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi oleh Camat; dan
    - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
  4. Khusus untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan :
    - a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APBD dan dibayarkan oleh Dispermades ;
    - b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;
    - c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan dilakukan oleh Dispermades kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengajuan penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;

- d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan mulai Januari 2021.

#### C. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara :

1. pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD, dan disetujui oleh Kepala Desa;
2. Kepala Desa mengajukan permohonan Pencairan ke Bank Pemerintah, dengan tembusan kepada Camat; dan
3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.

#### D. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.3 disertai dengan bukti yang lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan salinan SPJ diserahkan ke Camat;
2. Camat melakukan penelitian SPJ yang diterima dari Desa sebagaimana point 1. Apabila ditemukan ada kekurangan lampiran atau bukti pengeluaran keuangan serta ditemukan SPJ tidak sesuai antara rencana anggaran kas (RAK) dengan realisasinya maupun adanya penyimpangan maka Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan mengembalikan SPJ kepada Kepala Desa untuk dilakukan perbaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SPJ diterima;
3. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### E. PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh:
  - a. Pengawasan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan secara umum berupa kritik dan saran yang bersifat membangun; dan
  - b. Pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten.
2. Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### F. PENUTUP.

Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2021, guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.

II. CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....  
PEMERINTAH DESA .....  
Jln. .... Telp. .... Kode Pos .....

Nomor : .....  
Lamp. : .....  
Perihal : Permohonan Penyaluran

....., ..... 20xx  
Kepada:  
Yth. Bupati Pekalongan  
cq. Kepala Dispermades  
Lewat CAMAT .....

Di  
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang APBDes Tahun 20..., yang didalamnya memuat kegiatan bersumber dari ADD sebesar Rp..... (.....), meliputi :

1. Tahap I, sebesar : Rp.....
2. Tahap II, sebesar : Rp. ....
3. Tahap III, sebesar : Rp. ....
4. Tahap IV, sebesar : Rp. ....

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar Rp..... (.....), untuk ditransfer ke:

Bank : .....  
Nomr Rekening: .....  
Atas Nama : Pemerintah Desa .....

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. Dst. ....

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Kepala Desa .....  
Kecamatan .....

Cap + Ttd

.....

B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
KECAMATAN .....  
Jln. .... Telp. .... Kode Pos .....

---

REKOMENDASI

Nomor :

TENTANG  
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...  
TAHUN ANGGARAN 20xx

- a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2021.
- b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa..... Kecamatan ..... Nomor ..... Tanggal ....., dengan melampirkan persyaratan dan kelengkapan administrasi sebagai berikut :
  1. ....;
  2. ....;
  3. Dst... (sesuai tahapan)
  4. SPJ Tahap ..... sudah diterima Kecamatan pada tanggal .....
- c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (....) Tahun Anggaran 20xx untuk Desa ..... Kecamatan ..... sebesar Rp..... (.....)

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

....., ..... 20xx  
Camat .....

.....  
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI  
 PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx  
 KECAMATAN .....  
 KABUPATEN PEKALONGAN  
 TAHAP ....

| No.  | DESA | ANGGAR<br>AN | BID.<br>I<br>(Rp.) | BID. II<br>(Rp.) | BID.<br>III<br>(Rp.) | BID.<br>IV<br>(Rp.) | BID.V<br>(Rp.) | TOTAL<br>(Rp.)  | SIS<br>A   | KET |
|------|------|--------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|-----------------|------------|-----|
| 1    | 2    | 3            | 4                  | 5                | 6                    | 7                   | 8              | 9=4+5+6+<br>7+8 | 10=<br>3-9 | 11  |
| 1.   |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |
| 2.   |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |
| 3.   |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |
| 4.   |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |
| Dst. |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |
|      |      |              |                    |                  |                      |                     |                |                 |            |     |

....., ..... 20xx  
 Camat .....

.....  
 NIP.

III. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | KECAMATAN / DESA        | RINCIAN ADD PER DESA | TAHAP I     | TAHAP II    | TAHAP III   | TAHAP IV    |
|----|-------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>I KANDANG SERANG</b> |                      |             |             |             |             |
| 1  | 1 Klesem                | 537.068.000          | 134.267.000 | 134.267.000 | 134.267.000 | 134.267.000 |
| 2  | 2 Bodas                 | 518.772.000          | 129.693.000 | 129.693.000 | 129.693.000 | 129.693.000 |
| 3  | 3 Gembong               | 564.311.000          | 141.077.750 | 141.077.750 | 141.077.750 | 141.077.750 |
| 4  | 4 Sukoharjo             | 534.167.000          | 133.541.750 | 133.541.750 | 133.541.750 | 133.541.750 |
| 5  | 5 Garungwiyoro          | 540.307.000          | 135.076.750 | 135.076.750 | 135.076.750 | 135.076.750 |
| 6  | 6 Bubak                 | 424.163.000          | 106.040.750 | 106.040.750 | 106.040.750 | 106.040.750 |
| 7  | 7 Bojongkoneng          | 439.489.000          | 109.872.250 | 109.872.250 | 109.872.250 | 109.872.250 |
| 8  | 8 Luragung              | 519.416.000          | 129.854.000 | 129.854.000 | 129.854.000 | 129.854.000 |
| 9  | 9 Kandangserang         | 324.028.000          | 81.007.000  | 81.007.000  | 81.007.000  | 81.007.000  |
| 10 | 10 Wangkelang           | 490.856.000          | 122.714.000 | 122.714.000 | 122.714.000 | 122.714.000 |
| 11 | 11 Lambur               | 445.651.500          | 111.412.875 | 111.412.875 | 111.412.875 | 111.412.875 |
| 12 | 12 Tajur                | 440.216.000          | 110.054.000 | 110.054.000 | 110.054.000 | 110.054.000 |
| 13 | 13 Trajumas             | 536.500.000          | 134.125.000 | 134.125.000 | 134.125.000 | 134.125.000 |
| 14 | 14 Karanggondang        | 440.833.000          | 110.208.250 | 110.208.250 | 110.208.250 | 110.208.250 |
|    | <b>II PANINGGARAN</b>   | -                    | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1 Werdi                 | 539.503.000          | 134.875.750 | 134.875.750 | 134.875.750 | 134.875.750 |
| 2  | 2 Winduaji              | 461.185.000          | 115.296.250 | 115.296.250 | 115.296.250 | 115.296.250 |
| 3  | 3 Krandegan             | 396.124.000          | 99.031.000  | 99.031.000  | 99.031.000  | 99.031.000  |
| 4  | 4 Lumeneng              | 611.599.000          | 152.899.750 | 152.899.750 | 152.899.750 | 152.899.750 |
| 5  | 5 Tanggeran             | 478.115.000          | 119.528.750 | 119.528.750 | 119.528.750 | 119.528.750 |
| 6  | 6 Kaliboja              | 482.229.000          | 120.557.250 | 120.557.250 | 120.557.250 | 120.557.250 |
| 7  | 7 Kaliombo              | 387.231.000          | 96.807.750  | 96.807.750  | 96.807.750  | 96.807.750  |
| 8  | 8 Botosari              | 494.288.000          | 123.572.000 | 123.572.000 | 123.572.000 | 123.572.000 |
| 9  | 9 Sawangan              | 445.099.000          | 111.274.750 | 111.274.750 | 111.274.750 | 111.274.750 |
| 10 | 10 Panninggaran         | 503.493.000          | 125.873.250 | 125.873.250 | 125.873.250 | 125.873.250 |
| 11 | 11 Domiyang             | 567.094.000          | 141.773.500 | 141.773.500 | 141.773.500 | 141.773.500 |
| 12 | 12 Notogiwang           | 482.210.000          | 120.552.500 | 120.552.500 | 120.552.500 | 120.552.500 |
| 13 | 13 Lambanggelun         | 593.157.000          | 148.289.250 | 148.289.250 | 148.289.250 | 148.289.250 |
| 14 | 14 Tenogo               | 472.893.000          | 118.223.250 | 118.223.250 | 118.223.250 | 118.223.250 |
| 15 | 15 Bedagung             | 443.112.000          | 110.778.000 | 110.778.000 | 110.778.000 | 110.778.000 |
|    | <b>III LEBAKBARANG</b>  | -                    | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1 Tembelangunung        | 363.862.000          | 90.965.500  | 90.965.500  | 90.965.500  | 90.965.500  |
| 2  | 2 Pamutuh               | 377.560.000          | 94.390.000  | 94.390.000  | 94.390.000  | 94.390.000  |
| 3  | 3 Depok                 | 306.249.000          | 76.562.250  | 76.562.250  | 76.562.250  | 76.562.250  |
| 4  | 4 Wonosido              | 335.021.000          | 83.755.250  | 83.755.250  | 83.755.250  | 83.755.250  |
| 5  | 5 Timbangsari           | 333.994.000          | 83.498.500  | 83.498.500  | 83.498.500  | 83.498.500  |
| 6  | 6 Sidomulyo             | 419.356.000          | 104.839.000 | 104.839.000 | 104.839.000 | 104.839.000 |
| 7  | 7 Kutorembet            | 376.006.000          | 94.001.500  | 94.001.500  | 94.001.500  | 94.001.500  |
| 8  | 8 Lebakbarang           | 457.344.000          | 114.336.000 | 114.336.000 | 114.336.000 | 114.336.000 |
| 9  | 9 Kapundutan            | 310.431.000          | 77.607.750  | 77.607.750  | 77.607.750  | 77.607.750  |
| 10 | 10 Bantar Kulon         | 308.325.000          | 77.081.250  | 77.081.250  | 77.081.250  | 77.081.250  |
| 11 | 11 Mendolo              | 404.767.000          | 101.191.750 | 101.191.750 | 101.191.750 | 101.191.750 |
|    | <b>IV PETUNGKRIYONO</b> | -                    | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1 Simego                | 432.327.000          | 108.081.750 | 108.081.750 | 108.081.750 | 108.081.750 |
| 2  | 2 Songgodadi            | 411.896.000          | 102.974.000 | 102.974.000 | 102.974.000 | 102.974.000 |
| 3  | 3 Curugmuncar           | 382.675.000          | 95.668.750  | 95.668.750  | 95.668.750  | 95.668.750  |
| 4  | 4 Gumelem               | 295.460.000          | 73.865.000  | 73.865.000  | 73.865.000  | 73.865.000  |
| 5  | 5 Tlogohendro           | 502.979.000          | 125.744.750 | 125.744.750 | 125.744.750 | 125.744.750 |
| 6  | 6 Yosorejo              | 424.217.000          | 106.054.250 | 106.054.250 | 106.054.250 | 106.054.250 |
| 7  | 7 Tlogopakis            | 523.285.000          | 130.821.250 | 130.821.250 | 130.821.250 | 130.821.250 |
| 8  | 8 Kasimpar              | 386.091.000          | 96.522.750  | 96.522.750  | 96.522.750  | 96.522.750  |
| 9  | 9 Kayupuring            | 425.853.000          | 106.463.250 | 106.463.250 | 106.463.250 | 106.463.250 |
|    | <b>V TALUN</b>          | -                    | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1 Mesoyi                | 413.854.000          | 103.463.500 | 103.463.500 | 103.463.500 | 103.463.500 |
| 2  | 2 Jolotigo              | 450.331.000          | 112.582.750 | 112.582.750 | 112.582.750 | 112.582.750 |
| 3  | 3 Sengare               | 533.807.000          | 133.451.750 | 133.451.750 | 133.451.750 | 133.451.750 |
| 4  | 4 Donowangun            | 456.444.000          | 114.111.000 | 114.111.000 | 114.111.000 | 114.111.000 |
| 5  | 5 Talun                 | 349.908.000          | 87.477.000  | 87.477.000  | 87.477.000  | 87.477.000  |
| 6  | 6 Banjarsari            | 374.400.000          | 93.600.000  | 93.600.000  | 93.600.000  | 93.600.000  |
| 7  | 7 Kalirejo              | 375.082.000          | 93.770.500  | 93.770.500  | 93.770.500  | 93.770.500  |
| 8  | 8 Batusari              | 334.906.000          | 83.726.500  | 83.726.500  | 83.726.500  | 83.726.500  |
| 9  | 9 Karangasem            | 401.178.000          | 100.294.500 | 100.294.500 | 100.294.500 | 100.294.500 |
| 10 | 10 Krompeng             | 362.976.000          | 90.744.000  | 90.744.000  | 90.744.000  | 90.744.000  |
|    | <b>VI DORO</b>          | -                    | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1 Pungangan             | 365.935.000          | 91.483.750  | 91.483.750  | 91.483.750  | 91.483.750  |
| 2  | 2 Sidoharjo             | 365.122.000          | 91.280.500  | 91.280.500  | 91.280.500  | 91.280.500  |
| 3  | 3 Lemahabang            | 443.128.000          | 110.782.000 | 110.782.000 | 110.782.000 | 110.782.000 |
| 4  | 4 Rogoselo              | 405.471.000          | 101.367.750 | 101.367.750 | 101.367.750 | 101.367.750 |
| 5  | 5 Harjosari             | 397.961.000          | 99.490.250  | 99.490.250  | 99.490.250  | 99.490.250  |
| 6  | 6 Larikan               | 334.614.000          | 83.653.500  | 83.653.500  | 83.653.500  | 83.653.500  |
| 7  | 7 Sawangan              | 402.509.000          | 100.627.250 | 100.627.250 | 100.627.250 | 100.627.250 |
| 8  | 8 Dororejo              | 378.792.000          | 94.698.000  | 94.698.000  | 94.698.000  | 94.698.000  |
| 9  | 9 Doro                  | 422.027.000          | 105.506.750 | 105.506.750 | 105.506.750 | 105.506.750 |
| 10 | 10 Randusari            | 360.466.000          | 90.116.500  | 90.116.500  | 90.116.500  | 90.116.500  |
| 11 | 11 Kutosari             | 389.198.000          | 97.299.500  | 97.299.500  | 97.299.500  | 97.299.500  |
| 12 | 12 Wringinagung         | 388.173.000          | 97.043.250  | 97.043.250  | 97.043.250  | 97.043.250  |
| 13 | 13 Kalimojosari         | 387.959.000          | 96.989.750  | 96.989.750  | 96.989.750  | 96.989.750  |
| 14 | 14 Bligorejo            | 438.863.000          | 109.715.750 | 109.715.750 | 109.715.750 | 109.715.750 |

|    |             |                    |             |             |             |             |             |
|----|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>VII</b>  | <b>KARANGANYAR</b> | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Gutomo             | 404.485.000 | 101.121.250 | 101.121.250 | 101.121.250 | 101.121.250 |
| 2  | 2           | Limbangan          | 373.727.000 | 93.431.750  | 93.431.750  | 93.431.750  | 93.431.750  |
| 3  | 3           | Karanggondang      | 359.602.000 | 89.900.500  | 89.900.500  | 89.900.500  | 89.900.500  |
| 4  | 4           | Lolong             | 315.491.000 | 78.872.750  | 78.872.750  | 78.872.750  | 78.872.750  |
| 5  | 5           | Pedawang           | 440.853.000 | 110.213.250 | 110.213.250 | 110.213.250 | 110.213.250 |
| 6  | 6           | Pododadi           | 426.053.000 | 106.513.250 | 106.513.250 | 106.513.250 | 106.513.250 |
| 7  | 7           | Legokalong         | 453.925.000 | 113.481.250 | 113.481.250 | 113.481.250 | 113.481.250 |
| 8  | 8           | Karangsari         | 436.747.000 | 109.186.750 | 109.186.750 | 109.186.750 | 109.186.750 |
| 9  | 9           | Kulu               | 399.310.000 | 99.827.500  | 99.827.500  | 99.827.500  | 99.827.500  |
| 10 | 10          | Banjarejo          | 375.051.000 | 93.762.750  | 93.762.750  | 93.762.750  | 93.762.750  |
| 11 | 11          | Wonosari           | 424.706.000 | 106.176.500 | 106.176.500 | 106.176.500 | 106.176.500 |
| 12 | 12          | Sokosari           | 405.563.000 | 101.390.750 | 101.390.750 | 101.390.750 | 101.390.750 |
| 13 | 13          | Sidomukti          | 397.639.000 | 99.409.750  | 99.409.750  | 99.409.750  | 99.409.750  |
| 14 | 14          | Kayugeritan        | 478.170.000 | 119.542.500 | 119.542.500 | 119.542.500 | 119.542.500 |
| 15 | 15          | Kutosari           | 329.335.000 | 82.333.750  | 82.333.750  | 82.333.750  | 82.333.750  |
|    | <b>VIII</b> | <b>KAJEN</b>       | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Tambakroto         | 424.847.000 | 106.211.750 | 106.211.750 | 106.211.750 | 106.211.750 |
| 2  | 2           | Kutorojo           | 448.343.000 | 112.085.750 | 112.085.750 | 112.085.750 | 112.085.750 |
| 3  | 3           | Linggoasri         | 399.014.000 | 99.753.500  | 99.753.500  | 99.753.500  | 99.753.500  |
| 4  | 4           | Brengkolang        | 330.960.000 | 82.740.000  | 82.740.000  | 82.740.000  | 82.740.000  |
| 5  | 5           | Pringsurat         | 330.030.000 | 82.507.500  | 82.507.500  | 82.507.500  | 82.507.500  |
| 6  | 6           | Sokoyoso           | 406.832.000 | 101.708.000 | 101.708.000 | 101.708.000 | 101.708.000 |
| 7  | 7           | Sinangohprendeng   | 366.369.000 | 91.592.250  | 91.592.250  | 91.592.250  | 91.592.250  |
| 8  | 8           | Kajongan           | 335.740.000 | 83.935.000  | 83.935.000  | 83.935.000  | 83.935.000  |
| 9  | 9           | Pekiringanageng    | 362.006.000 | 90.501.500  | 90.501.500  | 90.501.500  | 90.501.500  |
| 10 | 10          | Gandarum           | 497.645.000 | 124.411.250 | 124.411.250 | 124.411.250 | 124.411.250 |
| 11 | 11          | Sabarwangi         | 345.747.000 | 86.436.750  | 86.436.750  | 86.436.750  | 86.436.750  |
| 12 | 12          | Kalijoyo           | 431.626.000 | 107.906.500 | 107.906.500 | 107.906.500 | 107.906.500 |
| 13 | 13          | Wonorejo           | 360.280.000 | 90.070.000  | 90.070.000  | 90.070.000  | 90.070.000  |
| 14 | 14          | Pekiringanalit     | 429.271.000 | 107.317.750 | 107.317.750 | 107.317.750 | 107.317.750 |
| 15 | 15          | Kutorejo           | 350.891.000 | 87.722.750  | 87.722.750  | 87.722.750  | 87.722.750  |
| 16 | 16          | Nyamok             | 419.806.000 | 104.951.500 | 104.951.500 | 104.951.500 | 104.951.500 |
| 17 | 17          | Tanjungkulon       | 334.144.000 | 83.536.000  | 83.536.000  | 83.536.000  | 83.536.000  |
| 18 | 18          | Tanjungsari        | 399.501.000 | 99.875.250  | 99.875.250  | 99.875.250  | 99.875.250  |
| 19 | 19          | Gejlig             | 511.095.000 | 127.773.750 | 127.773.750 | 127.773.750 | 127.773.750 |
| 20 | 20          | Kebonagung         | 494.828.000 | 123.707.000 | 123.707.000 | 123.707.000 | 123.707.000 |
| 21 | 21          | Sangkanjoyo        | 389.545.000 | 97.386.250  | 97.386.250  | 97.386.250  | 97.386.250  |
| 22 | 22          | Salit              | 481.417.000 | 120.354.250 | 120.354.250 | 120.354.250 | 120.354.250 |
| 23 | 23          | Sambiroto          | 480.440.000 | 120.110.000 | 120.110.000 | 120.110.000 | 120.110.000 |
| 24 | 24          | Rowolaku           | 386.744.000 | 96.686.000  | 96.686.000  | 96.686.000  | 96.686.000  |
|    | <b>IX</b>   | <b>KESESI</b>      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Windurojo          | 505.273.000 | 126.318.250 | 126.318.250 | 126.318.250 | 126.318.250 |
| 2  | 2           | Ujungnegoro        | 412.379.000 | 103.094.750 | 103.094.750 | 103.094.750 | 103.094.750 |
| 3  | 3           | Brondong           | 374.174.000 | 93.543.500  | 93.543.500  | 93.543.500  | 93.543.500  |
| 4  | 4           | Podosari           | 391.108.000 | 97.777.000  | 97.777.000  | 97.777.000  | 97.777.000  |
| 5  | 5           | Kwasen             | 440.713.000 | 110.178.250 | 110.178.250 | 110.178.250 | 110.178.250 |
| 6  | 6           | Langensari         | 382.086.000 | 95.521.500  | 95.521.500  | 95.521.500  | 95.521.500  |
| 7  | 7           | Jagung             | 351.142.000 | 87.785.500  | 87.785.500  | 87.785.500  | 87.785.500  |
| 8  | 8           | Watugajah          | 332.038.000 | 83.009.500  | 83.009.500  | 83.009.500  | 83.009.500  |
| 9  | 9           | Karangrejo         | 363.532.000 | 90.883.000  | 90.883.000  | 90.883.000  | 90.883.000  |
| 10 | 10          | Karyomukti         | 315.431.000 | 78.857.750  | 78.857.750  | 78.857.750  | 78.857.750  |
| 11 | 11          | Kesesi             | 482.007.000 | 120.501.750 | 120.501.750 | 120.501.750 | 120.501.750 |
| 12 | 12          | Srinahan           | 343.547.000 | 85.886.750  | 85.886.750  | 85.886.750  | 85.886.750  |
| 13 | 13          | Kaibahan           | 365.043.000 | 91.260.750  | 91.260.750  | 91.260.750  | 91.260.750  |
| 14 | 14          | Watupayung         | 332.970.000 | 83.242.500  | 83.242.500  | 83.242.500  | 83.242.500  |
| 15 | 15          | Krandon            | 407.927.000 | 101.981.750 | 101.981.750 | 101.981.750 | 101.981.750 |
| 16 | 16          | Ponolawen          | 366.118.000 | 91.529.500  | 91.529.500  | 91.529.500  | 91.529.500  |
| 17 | 17          | Kalimade           | 398.353.000 | 99.588.250  | 99.588.250  | 99.588.250  | 99.588.250  |
| 18 | 18          | Sidomulyo          | 357.174.000 | 89.293.500  | 89.293.500  | 89.293.500  | 89.293.500  |
| 19 | 19          | Sukorejo           | 371.265.000 | 92.816.250  | 92.816.250  | 92.816.250  | 92.816.250  |
| 20 | 20          | Sidosari           | 397.187.000 | 99.296.750  | 99.296.750  | 99.296.750  | 99.296.750  |
| 21 | 21          | Mulyorejo          | 347.809.000 | 86.952.250  | 86.952.250  | 86.952.250  | 86.952.250  |
| 22 | 22          | Pantirejo          | 399.912.000 | 99.978.000  | 99.978.000  | 99.978.000  | 99.978.000  |
| 23 | 23          | Kwiganan           | 399.018.000 | 99.754.500  | 99.754.500  | 99.754.500  | 99.754.500  |
|    | <b>X</b>    | <b>SRAGI</b>       | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Ketanonageng       | 334.552.000 | 83.638.000  | 83.638.000  | 83.638.000  | 83.638.000  |
| 2  | 2           | Mrican             | 321.277.000 | 80.319.250  | 80.319.250  | 80.319.250  | 80.319.250  |
| 3  | 3           | Bulaksari          | 496.743.000 | 124.185.750 | 124.185.750 | 124.185.750 | 124.185.750 |
| 4  | 4           | Sumublur           | 441.151.000 | 110.287.750 | 110.287.750 | 110.287.750 | 110.287.750 |
| 5  | 5           | Sumubkidul         | 392.432.000 | 98.108.000  | 98.108.000  | 98.108.000  | 98.108.000  |
| 6  | 6           | Kalijambe          | 498.695.000 | 124.673.750 | 124.673.750 | 124.673.750 | 124.673.750 |
| 7  | 7           | Purworejo          | 433.083.000 | 108.270.750 | 108.270.750 | 108.270.750 | 108.270.750 |
| 8  | 8           | Kedungjaran        | 433.458.000 | 108.364.500 | 108.364.500 | 108.364.500 | 108.364.500 |
| 9  | 9           | Klunjukan          | 360.283.000 | 90.070.750  | 90.070.750  | 90.070.750  | 90.070.750  |
| 10 | 10          | Gebangkerep        | 606.315.000 | 151.578.750 | 151.578.750 | 151.578.750 | 151.578.750 |
| 11 | 11          | Purwodadi          | 373.751.000 | 93.437.750  | 93.437.750  | 93.437.750  | 93.437.750  |
| 12 | 12          | Bulakpelem         | 487.954.000 | 121.988.500 | 121.988.500 | 121.988.500 | 121.988.500 |
| 13 | 13          | Tegalsuruh         | 394.329.000 | 98.582.250  | 98.582.250  | 98.582.250  | 98.582.250  |
| 14 | 14          | Krasakageng        | 469.830.000 | 117.457.500 | 117.457.500 | 117.457.500 | 117.457.500 |
| 15 | 15          | Sijeruk            | 369.192.000 | 92.298.000  | 92.298.000  | 92.298.000  | 92.298.000  |
| 16 | 16          | Tegalantar         | 396.582.000 | 99.145.500  | 99.145.500  | 99.145.500  | 99.145.500  |

|    |             |                    |             |             |             |             |             |
|----|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    | <b>XI</b>   | <b>BOJONG</b>      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Bukur              | 374.679.000 | 93.669.750  | 93.669.750  | 93.669.750  | 93.669.750  |
| 2  | 2           | Kalipancur         | 495.381.000 | 123.845.250 | 123.845.250 | 123.845.250 | 123.845.250 |
| 3  | 3           | Sumurjomblangbogo  | 469.630.000 | 117.407.500 | 117.407.500 | 117.407.500 | 117.407.500 |
| 4  | 4           | Pantianom          | 314.831.000 | 78.707.750  | 78.707.750  | 78.707.750  | 78.707.750  |
| 5  | 5           | Randumuktiwaren    | 467.523.000 | 116.880.750 | 116.880.750 | 116.880.750 | 116.880.750 |
| 6  | 6           | Legoklile          | 345.418.000 | 86.354.500  | 86.354.500  | 86.354.500  | 86.354.500  |
| 7  | 7           | Bojongwetan        | 368.402.000 | 92.100.500  | 92.100.500  | 92.100.500  | 92.100.500  |
| 8  | 8           | Wangandowo         | 394.764.000 | 98.691.000  | 98.691.000  | 98.691.000  | 98.691.000  |
| 9  | 9           | Duwet              | 314.221.000 | 78.555.250  | 78.555.250  | 78.555.250  | 78.555.250  |
| 10 | 10          | Ketitangkidul      | 306.262.000 | 76.565.500  | 76.565.500  | 76.565.500  | 76.565.500  |
| 11 | 11          | Menjangan          | 433.651.000 | 108.412.750 | 108.412.750 | 108.412.750 | 108.412.750 |
| 12 | 12          | Ketitanglor        | 276.539.000 | 69.134.750  | 69.134.750  | 69.134.750  | 69.134.750  |
| 13 | 13          | Rejosari           | 307.773.000 | 76.943.250  | 76.943.250  | 76.943.250  | 76.943.250  |
| 14 | 14          | Bojonglor          | 410.484.000 | 102.621.000 | 102.621.000 | 102.621.000 | 102.621.000 |
| 15 | 15          | Bojongminggir      | 368.294.000 | 92.073.500  | 92.073.500  | 92.073.500  | 92.073.500  |
| 16 | 16          | Wiroditan          | 355.366.000 | 88.841.500  | 88.841.500  | 88.841.500  | 88.841.500  |
| 17 | 17          | Kemasan            | 352.171.000 | 88.042.750  | 88.042.750  | 88.042.750  | 88.042.750  |
| 18 | 18          | Jajarwayang        | 376.900.000 | 94.225.000  | 94.225.000  | 94.225.000  | 94.225.000  |
| 19 | 19          | Babalanlor         | 390.052.000 | 97.513.000  | 97.513.000  | 97.513.000  | 97.513.000  |
| 20 | 20          | Babalankidul       | 351.931.000 | 87.982.750  | 87.982.750  | 87.982.750  | 87.982.750  |
| 21 | 21          | Karangsari         | 319.249.000 | 79.812.250  | 79.812.250  | 79.812.250  | 79.812.250  |
| 22 | 22          | Sembungjambu       | 440.394.000 | 110.098.500 | 110.098.500 | 110.098.500 | 110.098.500 |
|    | <b>XII</b>  | <b>WONOPRINGGO</b> | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Jetakkidul         | 385.029.000 | 96.257.250  | 96.257.250  | 96.257.250  | 96.257.250  |
| 2  | 2           | Sastrodirjan       | 356.481.000 | 89.120.250  | 89.120.250  | 89.120.250  | 89.120.250  |
| 3  | 3           | Legokgunung        | 379.641.000 | 94.910.250  | 94.910.250  | 94.910.250  | 94.910.250  |
| 4  | 4           | Galangpengampon    | 442.884.000 | 110.721.000 | 110.721.000 | 110.721.000 | 110.721.000 |
| 5  | 5           | Kwagean            | 345.290.000 | 86.322.500  | 86.322.500  | 86.322.500  | 86.322.500  |
| 6  | 6           | Getas              | 348.972.000 | 87.243.000  | 87.243.000  | 87.243.000  | 87.243.000  |
| 7  | 7           | Rowokembu          | 398.635.000 | 99.658.750  | 99.658.750  | 99.658.750  | 99.658.750  |
| 8  | 8           | Wonopringgo        | 316.001.000 | 79.000.250  | 79.000.250  | 79.000.250  | 79.000.250  |
| 9  | 9           | Sampih             | 300.776.000 | 75.194.000  | 75.194.000  | 75.194.000  | 75.194.000  |
| 10 | 10          | Gondang            | 319.645.000 | 79.911.250  | 79.911.250  | 79.911.250  | 79.911.250  |
| 11 | 11          | Wonorejo           | 363.498.000 | 90.874.500  | 90.874.500  | 90.874.500  | 90.874.500  |
| 12 | 12          | Jetaklengkong      | 301.843.000 | 75.460.750  | 75.460.750  | 75.460.750  | 75.460.750  |
| 13 | 13          | Pegadentengah      | 343.875.000 | 85.968.750  | 85.968.750  | 85.968.750  | 85.968.750  |
| 14 | 14          | Surobayan          | 305.640.000 | 76.410.000  | 76.410.000  | 76.410.000  | 76.410.000  |
|    | <b>XIII</b> | <b>KEDUNGWUNI</b>  | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Rowocacing         | 311.598.000 | 77.899.500  | 77.899.500  | 77.899.500  | 77.899.500  |
| 2  | 2           | Langkap            | 369.161.000 | 92.290.250  | 92.290.250  | 92.290.250  | 92.290.250  |
| 3  | 3           | Pajomblangan       | 339.630.000 | 84.907.500  | 84.907.500  | 84.907.500  | 84.907.500  |
| 4  | 4           | Tosaran            | 366.813.000 | 91.703.250  | 91.703.250  | 91.703.250  | 91.703.250  |
| 5  | 5           | Pakisputih         | 336.506.000 | 84.126.500  | 84.126.500  | 84.126.500  | 84.126.500  |
| 6  | 6           | Kedungpatangewu    | 338.643.000 | 84.660.750  | 84.660.750  | 84.660.750  | 84.660.750  |
| 7  | 7           | Podo               | 372.817.000 | 93.204.250  | 93.204.250  | 93.204.250  | 93.204.250  |
| 8  | 8           | Kwayangan          | 322.125.000 | 80.531.250  | 80.531.250  | 80.531.250  | 80.531.250  |
| 9  | 9           | Proto              | 352.976.000 | 88.244.000  | 88.244.000  | 88.244.000  | 88.244.000  |
| 10 | 10          | Salakbrojo         | 417.692.000 | 104.423.000 | 104.423.000 | 104.423.000 | 104.423.000 |
| 11 | 11          | Ambokembang        | 425.034.000 | 106.258.500 | 106.258.500 | 106.258.500 | 106.258.500 |
| 12 | 12          | Tangkiltengah      | 378.859.000 | 94.714.750  | 94.714.750  | 94.714.750  | 94.714.750  |
| 13 | 13          | Tangkilkulon       | 369.157.000 | 92.289.250  | 92.289.250  | 92.289.250  | 92.289.250  |
| 14 | 14          | Karangdowo         | 372.595.000 | 93.148.750  | 93.148.750  | 93.148.750  | 93.148.750  |
| 15 | 15          | Bugangan           | 324.754.000 | 81.188.500  | 81.188.500  | 81.188.500  | 81.188.500  |
| 16 | 16          | Rengas             | 385.706.000 | 96.426.500  | 96.426.500  | 96.426.500  | 96.426.500  |
|    | <b>XIV</b>  | <b>BUARAN</b>      | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Coprayan           | 325.173.000 | 81.293.250  | 81.293.250  | 81.293.250  | 81.293.250  |
| 2  | 2           | Wonoyoso           | 314.420.000 | 78.605.000  | 78.605.000  | 78.605.000  | 78.605.000  |
| 3  | 3           | Pakumbulan         | 366.631.000 | 91.657.750  | 91.657.750  | 91.657.750  | 91.657.750  |
| 4  | 4           | Watusalam          | 334.949.000 | 83.737.250  | 83.737.250  | 83.737.250  | 83.737.250  |
| 5  | 5           | Simbangwetan       | 321.416.000 | 80.354.000  | 80.354.000  | 80.354.000  | 80.354.000  |
| 6  | 6           | Kertijayan         | 369.176.000 | 92.294.000  | 92.294.000  | 92.294.000  | 92.294.000  |
| 7  | 7           | Paweden            | 347.575.000 | 86.893.750  | 86.893.750  | 86.893.750  | 86.893.750  |
|    | <b>XV</b>   | <b>TIRTO</b>       | -           | -           | -           | -           | -           |
| 1  | 1           | Wuled              | 334.576.000 | 83.644.000  | 83.644.000  | 83.644.000  | 83.644.000  |
| 2  | 2           | Ngalian            | 315.171.000 | 78.792.750  | 78.792.750  | 78.792.750  | 78.792.750  |
| 3  | 3           | Pandanarum         | 355.260.000 | 88.815.000  | 88.815.000  | 88.815.000  | 88.815.000  |
| 4  | 4           | Karanganyar        | 346.558.000 | 86.639.500  | 86.639.500  | 86.639.500  | 86.639.500  |
| 5  | 5           | Silirejo           | 401.103.000 | 100.275.750 | 100.275.750 | 100.275.750 | 100.275.750 |
| 6  | 6           | Pucung             | 327.602.000 | 81.900.500  | 81.900.500  | 81.900.500  | 81.900.500  |
| 7  | 7           | Dadirejo           | 434.671.000 | 108.667.750 | 108.667.750 | 108.667.750 | 108.667.750 |
| 8  | 8           | Sidorejo           | 401.541.000 | 100.385.250 | 100.385.250 | 100.385.250 | 100.385.250 |
| 9  | 9           | Curug              | 339.144.000 | 84.786.000  | 84.786.000  | 84.786.000  | 84.786.000  |
| 10 | 10          | Tanjung            | 296.672.000 | 74.168.000  | 74.168.000  | 74.168.000  | 74.168.000  |
| 11 | 11          | Samborejo          | 418.624.000 | 104.656.000 | 104.656.000 | 104.656.000 | 104.656.000 |
| 12 | 12          | Pacar              | 346.237.000 | 86.559.250  | 86.559.250  | 86.559.250  | 86.559.250  |
| 13 | 13          | Karangjampo        | 382.076.000 | 95.519.000  | 95.519.000  | 95.519.000  | 95.519.000  |
| 14 | 14          | Tegaldowo          | 383.401.000 | 95.850.250  | 95.850.250  | 95.850.250  | 95.850.250  |
| 15 | 15          | Mulyorejo          | 355.690.000 | 88.922.500  | 88.922.500  | 88.922.500  | 88.922.500  |
| 16 | 16          | Jeruksari          | 408.150.000 | 102.037.500 | 102.037.500 | 102.037.500 | 102.037.500 |

|    |              |                     |                        |                       |                       |                       |                       |
|----|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|    | <b>XVI</b>   | <b>WIRADESA</b>     | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1  | 1            | Kadipaten           | 346.047.000            | 86.511.750            | 86.511.750            | 86.511.750            | 86.511.750            |
| 2  | 2            | Delegtukang         | 300.430.000            | 75.107.500            | 75.107.500            | 75.107.500            | 75.107.500            |
| 3  | 3            | Karangjati          | 311.029.000            | 77.757.250            | 77.757.250            | 77.757.250            | 77.757.250            |
| 4  | 4            | Petukangan          | 309.154.000            | 77.288.500            | 77.288.500            | 77.288.500            | 77.288.500            |
| 5  | 5            | Wiradesa            | 445.431.000            | 111.357.750           | 111.357.750           | 111.357.750           | 111.357.750           |
| 6  | 6            | Warukidul           | 338.049.000            | 84.512.250            | 84.512.250            | 84.512.250            | 84.512.250            |
| 7  | 7            | Bondansari          | 412.457.000            | 103.114.250           | 103.114.250           | 103.114.250           | 103.114.250           |
| 8  | 8            | Warulor             | 314.461.000            | 78.615.250            | 78.615.250            | 78.615.250            | 78.615.250            |
| 9  | 9            | Kampil              | 373.144.000            | 93.286.000            | 93.286.000            | 93.286.000            | 93.286.000            |
| 10 | 10           | Kemplong            | 310.939.000            | 77.734.750            | 77.734.750            | 77.734.750            | 77.734.750            |
| 11 | 11           | Kauman              | 313.416.000            | 78.354.000            | 78.354.000            | 78.354.000            | 78.354.000            |
|    | <b>XVII</b>  | <b>SIWALAN</b>      | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1  | 1            | Mejasem             | 322.204.000            | 80.551.000            | 80.551.000            | 80.551.000            | 80.551.000            |
| 2  | 2            | Wonosari            | 340.754.000            | 85.188.500            | 85.188.500            | 85.188.500            | 85.188.500            |
| 3  | 3            | Tengengewetan       | 594.028.000            | 148.507.000           | 148.507.000           | 148.507.000           | 148.507.000           |
| 4  | 4            | Tunjungsari         | 405.278.000            | 101.319.500           | 101.319.500           | 101.319.500           | 101.319.500           |
| 5  | 5            | Blimbingwuluh       | 427.385.000            | 106.846.250           | 106.846.250           | 106.846.250           | 106.846.250           |
| 6  | 6            | Pait                | 565.826.000            | 141.456.500           | 141.456.500           | 141.456.500           | 141.456.500           |
| 7  | 7            | Tengengkulon        | 379.837.000            | 94.959.250            | 94.959.250            | 94.959.250            | 94.959.250            |
| 8  | 8            | Rembun              | 465.970.000            | 116.492.500           | 116.492.500           | 116.492.500           | 116.492.500           |
| 9  | 9            | Yosorejo            | 409.032.000            | 102.258.000           | 102.258.000           | 102.258.000           | 102.258.000           |
| 10 | 10           | Siwalan             | 494.269.000            | 123.567.250           | 123.567.250           | 123.567.250           | 123.567.250           |
| 11 | 11           | Boyoteluk           | 411.148.000            | 102.787.000           | 102.787.000           | 102.787.000           | 102.787.000           |
| 12 | 12           | Depok               | 349.117.000            | 87.279.250            | 87.279.250            | 87.279.250            | 87.279.250            |
| 13 | 13           | Blacanan            | 388.950.000            | 97.237.500            | 97.237.500            | 97.237.500            | 97.237.500            |
|    | <b>XVIII</b> | <b>KARANGDADAP</b>  | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1  | 1            | Logandeng           | 350.938.000            | 87.734.500            | 87.734.500            | 87.734.500            | 87.734.500            |
| 2  | 2            | Jrebengkembang      | 480.334.000            | 120.083.500           | 120.083.500           | 120.083.500           | 120.083.500           |
| 3  | 3            | Pagumenganmas       | 492.943.000            | 123.235.750           | 123.235.750           | 123.235.750           | 123.235.750           |
| 4  | 4            | Kedungkebo          | 431.813.000            | 107.953.250           | 107.953.250           | 107.953.250           | 107.953.250           |
| 5  | 5            | Kaligawe            | 387.353.000            | 96.838.250            | 96.838.250            | 96.838.250            | 96.838.250            |
| 6  | 6            | Karangdadap         | 446.760.000            | 111.690.000           | 111.690.000           | 111.690.000           | 111.690.000           |
| 7  | 7            | Kahilembu           | 379.158.000            | 94.789.500            | 94.789.500            | 94.789.500            | 94.789.500            |
| 8  | 8            | Pangkah             | 332.239.000            | 83.059.750            | 83.059.750            | 83.059.750            | 83.059.750            |
| 9  | 9            | Kebonrowopucang     | 511.847.000            | 127.961.750           | 127.961.750           | 127.961.750           | 127.961.750           |
| 10 | 10           | Kebonsari           | 445.702.000            | 111.425.500           | 111.425.500           | 111.425.500           | 111.425.500           |
| 11 | 11           | Pegandon            | 403.294.000            | 100.823.500           | 100.823.500           | 100.823.500           | 100.823.500           |
|    | <b>XIX</b>   | <b>WONOKERTO</b>    | -                      | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 1  | 1            | Werdi               | 377.656.000            | 94.414.000            | 94.414.000            | 94.414.000            | 94.414.000            |
| 2  | 2            | Rowoyoso            | 384.442.000            | 96.110.500            | 96.110.500            | 96.110.500            | 96.110.500            |
| 3  | 3            | Bebel               | 404.695.000            | 101.173.750           | 101.173.750           | 101.173.750           | 101.173.750           |
| 4  | 4            | Wonokertowetan      | 320.703.000            | 80.175.750            | 80.175.750            | 80.175.750            | 80.175.750            |
| 5  | 5            | Sijambe             | 336.922.000            | 84.230.500            | 84.230.500            | 84.230.500            | 84.230.500            |
| 6  | 6            | Pesanggrahan        | 318.264.000            | 79.566.000            | 79.566.000            | 79.566.000            | 79.566.000            |
| 7  | 7            | Pecakaran           | 344.249.000            | 86.062.250            | 86.062.250            | 86.062.250            | 86.062.250            |
| 8  | 8            | Api-api             | 384.737.000            | 96.184.250            | 96.184.250            | 96.184.250            | 96.184.250            |
| 9  | 9            | Wonokertokulon      | 354.111.000            | 88.527.750            | 88.527.750            | 88.527.750            | 88.527.750            |
| 10 | 10           | Tratebang           | 329.342.000            | 82.335.500            | 82.335.500            | 82.335.500            | 82.335.500            |
| 11 | 11           | Semut               | 350.750.000            | 87.687.500            | 87.687.500            | 87.687.500            | 87.687.500            |
|    |              | <b>JUMLAH TOTAL</b> | <b>107.856.136.500</b> | <b>26.964.034.125</b> | <b>26.964.034.125</b> | <b>26.964.034.125</b> | <b>26.964.034.125</b> |

Diundangkan di Kajen  
 Pada tanggal 18 Januari 2021  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,  
 ttd  
 BAMBANG IRIANTO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 20201NOMOR 2

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

  
 ENDANG MURDININGRUM, SH  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19631005 199208 2 001